

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Program pemberdayaan KAT merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi selama ini. Upaya ini telah dilakukan sejak lama dan hingga saat ini masih menjadi fokus pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam UUD RI yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Melalui kebijakan ini, pemerintah melakukan berbagai upaya dan strategi terkait pemberdayaan pada masyarakat komunitas adat terpencil, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Roakan Hulu, diantaranya, memberikan bantuan berupa pengadaan rumah, memberikan pelatihan keterampilan, serta pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana air bersih, dan lain sebagainya.

Tujuan daripada kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan ekonomi (pemenuhan kebutuhan hidup), meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman terhadap berbagai bidang ilmu kehidupan, serta membangun budaya masyarakat yang madani.

Hasil penelitian terkait kebijakan pemberdayaan KAT di desa Bonai menunjukkan, bahwa bila ditinjau dari segi hasil daripada pelaksanaan program tersebut, dinilai berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan rencana meskipun tidak sepenuhnya, dengan indikator adalah dengan melihat kondisi masyarakat

KAT sekarang ini yang secara perlahan sudah merasakan manfaat program tersebut. Namun bila ditinjau dari segi pelaksanaan program tersebut, masih banyak hal yang menjadi faktor penghambat atau kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya, diantaranya :

1. Kurangnya dukungan atau kerjasama dari beberapa instansi pemerintah atau swasta. Sebagian elemen pemerintah maupun swasta tidak ingin turut andil memberikan bantuan atau dukungan terhadap program tersebut, hal ini disebabkan karena adanya faktor kepentingan politik atau *conflict interest*. Sehingga ini mengakibatkan minimnya investasi modal (*funding effect*) yang dimiliki oleh instansi yang menangani langsung program tersebut. Namun ada juga instansi atau lembaga yang mendukung program tersebut yang memang memiliki peran dalam menjalankan program sosial.
2. Kurangnya pantauan pemerintah untuk melihat perkembangan warga KAT tersebut yang memungkinkan pemberdayaan lanjutan.
3. Faktor budaya masyarakat KAT yang masih primitif, sehingga hal ini mengakibatkan kesulitan para aparat pelaksana dalam berinteraksi dengan masyarakat KAT terutama dalam proses sosialisasi, karena mereka masih bertahan pada kebiasaan hidup yang serba tradisional dan *localizm*. Dan ini bahkan mempengaruhi dalam proses pelaksanaan program tersebut.

6.2 SARAN

Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak akan sepenuhnya berjalan dengan sempurna, olehnya kebijakan pemberdayaan komunitas adat terpencil yang dilaksanakan di desa Bonai Kabupaten Rokan Hulu ini masih belum terlalu baik secara total. Namun dengan ini, maka penulis berharap kelanjutan pembangunan atas kesejahteraan masyarakat KAT tersebut dan pemerintah lebih memperhatikan perkembangan masyarakat tersebut dengan upaya-upaya menciptakan kemandirian masyarakat yang diberdayakan. beberapa saran yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam hal ini yang berperan sebagai pelaksana kebijakan untuk mampu menjalankan suatu kebijakan kedepan yang lebih baik.